



LKPD

PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA INDONESIA DARI MASA KE MASA

PENDIDIKAN PANCASILA

Ridwansyah, S.Pd., M.Pd.



Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa

1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945-27 Desember 1949



Gambar : 3.4.3 Menjelang Kemerdekaan Indonesia
Sumber : intisari.gris.id

Pada periode ini, bentuk Negara Republik Indonesia adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya.

Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945. Dilaksanakanlah sidang PPKI. Sidang tersebut menetapkan UUD NRI Tahun 1945 dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Setelah itu PPKI menetapkan pembagian kekuasaan dengan membagi Indonesia menjadi 8 provinsi. Pada tanggal 29 Agustus 1945 dibentuklah KNIP dan PPKI dibubarkan. Salah satu ketetapan mengenai dibentuknya KNIP adalah pernyataan dari rakyat Indonesia untuk hidup aman sebagai bangsa yang merdeka, persatuan kebangsaan yang erat, menjaga keselamatan umum, dan membantu para pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia.

Pada tanggal 2 September 1945 disusunlah kabinet pertama RI yang mengangkat 17 menteri juga mengangkat sejumlah pejabat tinggi negara. Setelah itu keluarlah maklumat pemerintahan yaitu Maklumat 5 Oktober 1945, Maklumat 3 November 1945 dan Maklumat 14 November 1945. Setelah dikeluarkan Maklumat 14 November 1945 kedudukan presiden berubah, hanya berfungsi sebagai kepala negara saja. Karena fungsi kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Terlihatlah sistem pemerintahan Indonesia yang beralih dari sistem pemerintahan presidensial ke sistem pemerintahan parlementer. Dengan peralihan ke sistem pemerintahan parlementer, membuat terbentuknya banyak kabinet seperti kabinet presidensial, kabinet Sjahrir I, kabinet Sjahrir II, kabinet Sjahrir III, kabinet Amir Sjarifuddin I, kabinet Amir Sjarifuddin II, Hatta I dan Hatta II.

Pada masa ini terjadi pula pemberontakan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun 1948 dan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)



Gambar : 3.4.4 Penandatanganan Piagam Persatuan RIS
Sumber : wawasan sejarah.com

Negara Indonesia berubah bentuk negara dari negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Serikat. Hal itu terjadi sejak 27 Desember 1949 pada perjanjian Konferensi Meja Bundar. Berdasarkan konstitusi RIS, presiden adalah kepala negara tidak didampingi oleh seorang wakil presiden. Jika berhalangan hadir maka yang menggantikan posisi presiden adalah perdana menteri dan tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan perdana menteri dan para menteri kabinet. Berarti saat ini Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Pada sistem ini kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan apabila pertanggungjawaban kabinet tidak diterima oleh parlemen maka kabinet harus mengundurkan diri atau dibubarkan.

Konstitusi RIS mengenal 6 lembaga negara yaitu presiden, dewan menteri, senat, DPR, MA, DPK (Dewan Pengawas Keuangan). Berlakunya sistem pemerintahan parlementer ini tidak berlaku lama, hanya kurang lebih delapan bulan kemudian RIS dibubarkan dan kembalilah Indonesia dengan bentuk negara kesatuan. Pada masa ini pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil), Pemberontakan Andi Azis dan Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS).

3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Demokrasi Liberal (17 Agustus 1945-5 Juli 1959)

Setelah RIS dibubarkan Indonesia menggunakan konstitusi UUDS 1950. Bentuk negara RI adalah negara kesatuan. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan parlementer. Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah namun, tanggung jawab pemerintah ditangan perdana menteri bersama para menternya. Presiden dan wakil presiden tidak boleh diganggu gugat. Penanggung jawab tindakan pemerintah adalah para menteri sebagai kepala negara, tugas presiden terbatas contohnya hanya mengesahkan dewan menteri yang diusulkan oleh formatur kabinet, memberi tanda-tanda kehormatan sesuai dengan undang-undang dan melaksanakan tugas-tugas seremonial. Dalam UUDS 1950 yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan dan pemerintahan adalah menteri-menteri kepada DPR. Di UUDS 1950 juga hanya mengenal 5 lembaga negara yaitu presiden, menteri, DPR, MA dan DPK (Dewan Pengawas Keuangan). Pada masa demokrasi liberal terjadi ketegangan sosial politik akibat beberapa kali bergantinya kabinet, gagalnya Konstituante menentukan dasar negara, serta terjadinya sejumlah pemberontakan seperti PRRI/Permesta. Akibatnya muncul desakan untuk memberlakukan kembali UUD NRI Tahun 1945. Pada masa ini pemberontakan yang terjadi adalah Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh dan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)/Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta).

4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959-12 Maret 1967)



Gambar : 3.4.5 Presiden Ir. Soekarno

Sumber : gurupendidikan.co.id

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pemerintah memberlakukan kembali UUD NRI Tahun 1945. Berarti sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan presidensial. Presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai karena kedudukan presiden lebih dominan. Penyimpangan yang terjadi contohnya para pemimpin MPR, DPR, BPK dan MA diberi kedudukan sebagai menteri, sehingga ditempatkan sebagai bawahan presiden, Presiden membubarkan DPR Tahun 1960 dan adanya UU No. 19 tahun 1964 yang membuat presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan. Pada masa ini pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan G30S/PKI.

5. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Orde Baru (12 Maret 1967-21 Mei 1998)

Pada masa orde baru sistem pemerintahan tetap berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 yaitu sistem presidensial. Presiden menjadi penyelenggara negara dengan bantuan para menteri. Selama orde baru telah terbentuk 7 kabinet dengan nama Kabinet Pembangunan I sampai Pembangunan 7. Tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti pembatasan hak-hak politik rakyat, pemusatan kekuasaan ditangan presiden dan KKN. Setelah itu kekuasaan orde baru berakhir setelah munculnya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Soeharto melalui gerakan reformasi. Akhirnya Soeharto mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presidenmya, B.J. Habibie sebagai presiden RI ketiga.

6. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Reformasi (21 Mei 1998-Sekarang)



Gambar : 3.4.6 Peristiwa 1998

Sumber : cnn.indonesia.com

Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden Indonesia memasuki masa reformasi. Dimana muncul kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, antara lain sebagai berikut kemerdekaan pers, kemerdekaan membentuk partai politik, terselenggaranya pemilu yang demokratis dan Otonomi Daerah pada tahun 1999. Pada masa reformasi, dilakukan amandemen atau perubahan pada UUD NRI Tahun 1945, termasuk mengenai penyelenggaraan negara. Salah satu tujuannya adalah agar kekuasaan presiden tidak disalahgunakan. Pada masa reformasi Indonesia mengalami lima kali pergantian presiden yaitu B.J. Habibie (memimpin tahun 1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001), Megawati Soekarno Putri (2001-2004), Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dan Joko Widodo (Sejak Tahun 2004).



Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri.
– Mohammad Yamin

Jatuh banggunya negara ini, sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta.
– Mohammad Hatta



Kerjakan Soal di Bawah ini

1. Bentuk pemerintahan apa yang diambil Indonesia pada periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949, dan apa peran presiden dalam pemerintahan?

2. Apa saja tantangan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang terjadi pada periode ini, dan bagaimana cara mengatasinya oleh pemerintah?

3. Perubahan besar apa saja yang terjadi pada bentuk negara Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, dan peristiwa apa yang menandai perubahan tersebut?

4. Berapa lama sistem pemerintahan parlementer setelah RIS dibubarkan, lalu apa yang terjadi dengan Indonesia?

Soal Lanjutan!

5. Mengapa ketegangan sosial dan politik muncul pada masa demokrasi liberal, dan pemberontakan apa saja yang terjadi pada masa tersebut?

6. Apa pentingnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dalam pengesahan kembali UUD NRI Tahun 1945, dan sistem pemerintahan seperti apa yang diterapkan?

7. Bagaimana berakhirnya masa Orde Baru dan siapa penerus Soeharto sebagai presiden ketiga Indonesia?

8. Mengapa dilakukan amandemen UUD 1945 pada Era Reformasi, dan apa salah satu tujuannya?

Soal Lanjutan!

9. Apa saja kebijakan terkait kebebasan politik dan pemerintahan yang muncul pada Era Reformasi?

10. Dalam konteks Era Reformasi, sebutkan lima orang yang menjabat sebagai presiden Indonesia berturut-turut sejak tahun 1998 hingga sekarang.

Setelah mempelajari Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa apa kesimpulan yang bisa kamu ambil?